



KEBIJAKAN PENGELOLAAN DESA WISATA CILEMBER KABUPATEN BOGOR

Nining Latianingsih¹, Iis Mariam², Narulita Syarweni³, Christina L Rudatin⁴, Meisa Sofia⁵

¹ Jurusan Administrai Niaga-Politeknik Negeri Jakarta, nining.latianingsih@bisnis.pnj.ac.id

² Jurusan Administrasi Niaga-Politeknik Negeri Jakarta, iis.mariam@bisnis.pnj.ac.id

³ Jurusan Administrasi Niaga-Politeknik Negeri Jakarta, narulita.syarweni@bisnis.pnj.ac.id

⁴ Jurusan Administrasi Niaga-Politeknik Negeri Jakarta, christina.lr@bisnis.pnj.ac.id

⁵ IKDU Center, meisa.sofia@gmail.com

ABSTRACT

Tourism as a source of foreign exchange for the country is a sector that has been affected by Covid-19. Since the pandemic, many tourism activities have been affected, some have been suspended or even canceled. Tourism events such as exhibitions and large conferences cannot be held. A quick response is needed to quickly rise up by making new policies in the management of tourist villages. A system that can accelerate economic recovery is needed to improve social relations, business relations and most importantly the health and welfare of the people. Based on these facts, tourism village business innovations need to be formulated in the form of policies (laws) as guidelines for managing sustainable tourism development that are more appropriate in the future. The main purpose of this research is as a recommendation regarding development policies in rural areas through increasing economic capacity in tourist villages. The research method used is descriptive, describing special details of a situation, social situation or social relationship. The research location is the Cilember Tourism Village, Bogor Regency which is considered representative for policy studies to accelerate media-based village economic development. The development of tourist villages can be developed with the pentahelix model. Existing policy collaborations are often not optimal in increasing social resilience in the culture of rural communities. The focus on community empowerment is carried out with a participatory strategy in the corridor of good village governance. The formation of village regulations regarding the management of tourist villages is very important and should be made as soon as possible by the Regional Government. This regulation is certainly a legal basis or guideline for the government and the community so that tourist villages can be managed properly. The output of the research can be used as input for policy at a wider level, copyright, books, software, and academic manuscript drafts. While the level of Technology Readiness at TKT 6.

Keywords: *Community Empowerment, Innovation, Regional Policy, Tourism Village, Village Economy*

ABSTRAK

Pariwisata sebagai sumber devisa negara adalah sektor yang terimbas Covid-19. Sejak pandemi banyak kegiatan pariwisata terkena imbasnya, beberapa ditangguhkan bahkan dibatalkan. Acara pariwisata seperti pameran dan konferensi besar tidak dapat diselenggarakan. Perlu respon cepat untuk segera bangkit dengan membuat kebijakan baru dalam pengelolaan desa wisata. Sistem yang bisa mempercepat pemulihan ekonomidiperlukan untuk memperbaiki hubungan sosial, hubungan bisnis serta yang paling penting adalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut inovasi bisnis desa wisata perlu dirumuskan dalam bentuk kebijakan (hukum) sebagai pedoman pengelolaan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang lebih tepat di masa mendatang. Tujuan utama dari penelitian ini sebagai rekomendasi mengenai kebijakan pembangunan di pedesaan melalui peningkatan kapasitas perekonomian pada desa wisata. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, menggambarkan detail khusus dari suatu keadaan, situasi sosial atau hubungansosial. Lokasi riset adalah Desa Wisata Cilember Kabupaten Bogor yang dinilai representatif untuk dilakukan kajian kebijakan dengan akselerasi pembangunan ekonomi desa berbasis media. Pengembangan desa wisata dapat dikembangkan dengan model pentahelix. Kolaborasi kebijakan yang ada sering kali tidak optimal dalam meningkatkan ketahanan sosial pada budaya masyarakat desa. Fokus pada pemberdayaan masyarakat diselenggarakan dengan strategi partisipasi dalam koridor good village governance. Pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan desa wisata sangat penting dan dibuat segera mungkin dibuat oleh Pemerintah Daerah. Peraturan ini tentunya menjadi landasan hukum atau pedoman bagi pemerintah dan masyarakat agar desa wisata dapat terkelola dengan baik. Luaran dari



penelitian dapat dijadikan masukan kebijakan pada level yang lebih luas, hak cipta, buku, software, dan draft naskah akademik. Sedangkan tingkat Kesiapan Teknologi pada TKT 6.

Kata kunci: Desa Wisata, Ekonomi Desa, Inovasi, Kebijakan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia sangat berimbas pada seluruh aspek kehidupan. Tiga sektor yang paling terpengaruh adalah kesehatan, sosial, dan ekonomi termasuk di dalamnya pariwisata yang merupakan bagian dari sektor ekonomi. UNWTO (2021) menyebutkan bahwa dengan pembatasan mobilitas manusia dari sektor pariwisata dapat mengendalikan penyebaran pandemic. Covid-19 menyebabkan penurunan kedatangan internasional sebesar 74% di berbagai negara. Di Asia- Pasifik penurunan kedatangan turis internasional turun sebesar 84% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indonesia juga mengalami penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 25% (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021). Hal serupa terjadi pada wilayah yang menggantungkan ekonominya pada kegiatan pariwisata mengalami penurunan tingkat ekonomi yang sangat signifikan salah satunya adalah keberlangsungan desa wisata. Soehardi (2021) menjelaskan bawa desa wisata yang sejatinya sebagai bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, serta fasilitas pendukung berbasis budaya ramah tama dengan sumber daya lokal guna menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha di desa kini turut terdampak.

Desa wisata di Indonesia yang berjumlah 1.734 desa mengambil tindakan dengan menolak semua

kunjungan sejak diberlakukannya masa darurat Covid-19. Keputusan tersebut dilakukan oleh masyarakat desa setempat yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) guna mematuhi kebijakan pemerintah serta menjaga keamanan dan kondusivitas desa. Terhentinya operasional desa wisata mengakibatkan matinya geliat pariwisata yang mana aktivitas tersebut berdampak pada kehilangan mata pencaharian dan pendapatan masyarakat.

Selain berimbas pada keberlangsungan hidup Sumber Daya Manusianya, pandemi Covid-19 juga turut meredupkan UMKM sebagai salah satu pendorong kegiatan pariwisata, dimana kegiatan pariwisata harus terdapat something to see, something to do, dan something to buy. Something to see dan something to do erat kaitannya dengan sumber daya pariwisata yang dimiliki suatu destinasi baik itu berupa alam, budaya, maupun buatan serta kegiatan apa saja yang dapat dilakukan. Something to buy berhubungan dengan produk yang diolah masyarakat setempat dimana untuk pariwisata pedesaan yang terwujud dalam desa wisata adalah produk UMKM (Helpiastuti, 2018).

Dampak serupa terjadi di desa wisata di wilayah Kabupaten Bogor, menurut penuturan salah satu desa wisata di sana Bapak Abas Helmi Ketua Desa Wisata Cilember pandemi berimbas pada menurunnya jumlah kunjungan wisatawan serta menjadikan taraf ekonomi desa melemah. Masyarakat



banyak kehilangan sumber mata pencaharian dimana kebanyakan penduduk bekerja pada sektor pariwisata. Salah satunya adalah pengrajin bunga kayu biasa menjajakan dagangannya di Wisata Taman Matahari. Ditutupnya Daya Tarik Wisata tersebut karena peraturan pembatasan kegiatan mengakibatkan terhentinya roda perekonomian desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya serta peran dari seluruh pihak untuk bersama-sama menemukan solusi untuk kegiatan pariwisata yang sangat berdampak pada sektor ekonomi. Satu diantaranya adalah adanya kebijakan yang mampu mengoptimalkan pengelolaan desa wisata di Cilember dan menghadapi tantangan pandemi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Peneliti melakukan observasi di Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Fokus penelitian ini terletak pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah setempat bersama masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya sistem pengelolaan Desa Wisata Cilember
2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan desa wisata dalam menghadapi pandemi

Proses penelitian ini dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, sampai dengan penyusunan laporan. Data yang digunakan berasal dari wawancara dan observasi langsung. Selain itu diperoleh pula data pendukung yang

berasal dari studi pustaka berkaitan dengan subjek dan objek penelitian. Penganalisisan data dilakukan dengan pengorganisasian data, reduksi data, mencocokkan seluruh data dengan arah penelitian, serta penyajian yakni analisis untuk menarik kesimpulan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Temuan

Kebijakan Perjalanan di Era Pandemi Covid-19

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan upaya di masa pandemi untuk tetap menyelenggarakan kegiatan pariwisata namun dengan penetapan aturan pembatasan. Aturan yang diupayakan untuk menjaga kegiatan mobilitas selama pandemi dimulai dari pengetatan jumlah wisatawan, hingga pemberlakuan administrasi perjalanan khusus. Oleh sebab itu, wisatawan yang hendak melakukan perjalanan harus memenuhi beberapa persyaratan administrasi seperti sertifikat vaksin, aplikasi e-HAC, aplikasi Peduli Lindungi, dan memerhatian CHSE.

Sementara itu, aturan terkait penyelenggaraan kegiatan pariwisata khususnya desa wisata di Kabupaten Bogor belum tersedia secara khusus sehingga dalam penyelenggarannya Desa Wisata di Cilember masih mengindik pada peraturan yang diterapkan Kementerian Pariwisata.

Desa Wisata Cilember

Desa Cilember yang secara administratif berada di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah yang berada di Kawasan Puncak dimana sangat



menggantungkan perekonomiannya pada kegiatan pariwisata dan pertanian. Desa ini memiliki keindahan alam pegunungan yang asri dengan diapit oleh dua buah sungai yakni Sungai Ciliwung dan Sungai Ciesek. Masyarakat turut terlibat dalam kegiatan pariwisata yang mana para pemuda di desa bekerja sebagai local tour guide, outbound, dan photography. Pada awal tahun 2015 atas inisiasi masyarakat dan pemerintah setempat maka dibentuk Desa Wisata Cilember secara resmi.

Potensi pariwisata yang terdapat di Desa Cilember salah satunya adalah keberadaan masyarakat pengrajin bunga kayu. Di kampung Kota Batu hampir 75% masyarakatnya adalah pengrajin. Bahan baku dalam pembuatan kerajinan tersebut berasal dari limbah kayu dan hasilnya dijual di Taman Wisata Matahari. Kegiatan membuat kerajinan bunga merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan yang terdapat paket desa wisata. Hasil dari kerajinan yang dibuat wisatawan dapat dijadikan sebagai buah

tangan serta kenangan dari Desa Wisata Cilember.

Adapun atraksi wisata yang menjadi daya tarik Desa Cilember adalah aktivitas ekowisata mulai dari saba lembur yakni kegiatan dimana wisatawan diajak berkeliling kampung menyusuri sawah dan sungai, membajak sawah, menanam padi, berkebun, beternak, merangkai bunga kayu, jaipong, pencak silat, ngaliwet, dll.

Lokasi yang digunakan untuk kegiatan tersebut dilakukan di sawah dan kebun milik masyarakat yang diperbolehkan untuk digunakan lembaga desa wisata.

Keberhasilan pengembangan pariwisata, termasuk pedesaan sangat bergantung pada kualitas produk, aksesibilitas dan infrastruktur destinasi, ketersediaan keterampilan, dan minat investor (Okech, Haghiri, & George, 2012). Parameter destinasi wisata menurut Spillane (1994) untuk menjadi tempat wisata yang layak tergantung pada tiga aspek A yaitu: atraksi, amenitas, dan aksesibilitas.

Tabel 1 Identifikasi Pengembangan Pariwisata Desa Cilember

Indikator	Desa Wisata Cilember
Atraksi	Kehidupan pedesaan yang memberi wisatawan pengalaman bagaimana hidup di daerah pedesaan dan melakukan aktivitas seperti penduduk asli Kampung Sawah Pencak silat Wisata edukasi kerajinan bunga limbah kayu Saba lembur yang merupakan kegiatan mengajak wisatawan jalan-jalan keliling desa melewati persawahan dan sungai
Amenitas	Rumah penduduk adalah akomodasi bagi wisatawan Fasilitas umum menyatu dengan masyarakat
Aksesibilitas	Terletak di Kawasan Puncak kurang lebih 5 menit dari jalan utama juga dalam kondisi baik
Penerimaan masyarakat terhadap wisatawan	Masyarakat menyambut turis dengan ramah, mereka memperlakukan turis seperti keluarga sendiri Tahun 2019 Cilember memiliki 20 homestay



Segmen pasar	Wisatawan nusantara dan mancanegara
Jumlah kunjungan	Pada tahun 2019, 45 wisman dan 897 wisnus

Sumber: Hasil Analisis, 2021

PEMBAHASAN

Pengelolaan Desa Wisata Cilember

Desa wisata dapat beroperasi dengan adanya partisipasi dari seluruh pihak dalam pengelolaannya. Untuk mengetahui tingkat partisipasi tersebut perlu diidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Secara langsung dan tidak langsung para pemangku kepentingan yang memiliki peran di desa wisata

memberikan dampak terhadap sistem pengelolaan kegiatan pariwisata. Karena kebijakan yang diambil untuk pengembangan pariwisata di desa akan mempengaruhi keberhasilan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Adapun pihak-pihak yang terlibat tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Keterlibatan Stakeholder di Desa Wisata Cilember

Sektor	Desa Wisata Cilember	Peran dalam Pengembangan Pariwisata
Komunitas/ masyarakat	Pokdarwis/ Kompepar	Sebagai penggerak seluruh kegiatan pariwisata di Cilember
	Asdewi (Asosiasi Desa Wisata Indonesia) Kabupaten Bogor	Sebagai kesatuan kelompok penggerak desa wisata di tingkat kabupaten, membantu pengembangan informasi dan sumber daya manusia
Pemerintah	Pemerintah Desa Cilember	Perwakilan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat dan bagian dari masyarakat sebagai pendukung dan penggerak upaya pengembangan desa wisata
	Pemerintah Kabupaten Bogor	Selama ini peran pemerintah daerah Kabupaten Bogor adalah pengesahan Desa Wisata Cilember
Swasta		Belum ada program khusus yang diinisiasi oleh pihak swasta kecuali CSR
Akademisi	Politeknik Negeri Jakarta	Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan dalam pengelolaan desa wisata serta kegiatan pemberdayaan lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa
	Universitas Indonesia	Melakukan penelitian tentang peran perempuan di Cilember
Media	Media online lokal	Memuat berita

Sumber: Hasil Analisis, 2021

Peran pemangku kepentingan belum terlalu berpengaruh sehingga pengembangan Desa Wisata Cilember membutuhkan banyak peran pelibatan para pemangku kepentingan terutama pihak swasta dan media. Dalam pengembangan pariwisata Cilember yang

berkelanjutan, masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama yang memiliki peran penting dalam setiap aspek kepariwisataan. Community Based Tourism merupakan konsep utama dalam mengembangkan pariwisata untuk meningkatkan aktualisasi masyarakat.



Selain itu, bentuk Community Based Tourism di Cilember bersifat bottom-up dimana kesadaran pariwisata berasal dari masyarakat untuk memanfaatkan potensi wisata. Rekomendasi Kebijakan dalam Pengelolaan Desa Wisata Cilember

Dengan berbagai kelebihan, kekurangan, serta keterbatasan yang dimiliki Desa Wisata Cilember pembangunan pariwisata dapat berjalan dengan baik serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa dapat dilakukan dengan optimalisasi model pentahelix. Selain itu, masalah yang terjadi adalah kebijakan yang ada kerap kali tidak optimal dan tidak tepat sasaran dalam meningkatkan ketahanan social pada masyarakat desa. Fokus pada pemberdayaan masyarakat perlu diselenggarakan dengan strategi partisipasi dalam koridor good village governance. Pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan desa wisata juga sangat penting dan perlu dibuat sesegera mungkin oleh Pemerintah Daerah guna memfasilitasi dan mempermudah masyarakat desa dalam menjalankan usahanya memenuhi kebutuhan ekonomi dari kegiatan pariwisata. Peraturan ini tentunya juga menjadi landasan hukum atau pedoman bagi pemerintah dan masyarakat agar desa wisata dapat dikelola dengan baik. Adapun untuk kebijakan yang lebih spesifik dan khusus bagi pengembangan Desa Wisata cukup hanya dengan Peraturan Desa yang disahkan oleh Kepala Desa.

Adapun penelitian ini merekomendasikan pihak pemerintah desa untuk mengoptimalkan peran stakeholder terkait siapa berbuat apa. Dengan kata lain adanya kebijakan atau peraturan

dalam pengelolaan desa wisata dapat memperjelas mengenai pihak-pihak yang terlibat beserta tugas yang perlu dilakukan untuk mengembangkan pariwisata desa.

KESIMPULAN

Pengelolaan Desa Wisata di Cilember sudah terselenggara dengan baik dimana masyarakat sangat berperan aktif dalam. Ketersediaan sarana dan prasarana sudah mampu memfasilitasi kunjungan wisatawan. Peran dari para pemangku kepentingan secara pentahelix juga sudah terjalin hanya saja perlu adanya kolaborasi dengan sektor swasta mengingat belum terdapat program kerja sama yang spesifik. Untuk mewujudkan pengelolaan desa wisata yang optimal diperlukan pula kebijakan yang spesifik bagi Desa Wisata Cilember. Kebijakan tersebut dapat pula hanya setingkat desa berupa Peraturan Desa di mana di dalamnya mencakup aturan yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan bahkan perlu pula mencantumkan mitigasi dalam menghadapi Pandemi Covid-19 maupun bencana lainnya.

SARAN

Dalam pembahasan pada penelitian ini untuk mengoptimalkan tujuan penelitian maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Desa Wisata Cilember diperlukan kerja sama dari berbagai sektor terutama sektor swasta.
2. Kebijakan untuk mengatur pengelolaan desa wisata perlu dilegalisasikan dengan peraturan. Untuk cakupannya peraturan desa sudah cukup mengingat wilayah yang dikembangkan secara administratif



adalah desa. Selain itu, peraturannya bisa lebih spesifik dan khusus terkait penyelenggaraan kegiatan pariwisata di Desa Cilember.

3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Desa Cilember yang dapat diwujudkan dengan pelatihan mengenai pengelolaan desa wisata. Pelatihan dapat dijalankan dengan program kerja sama dengan pihak pemerintah daerah atau dengan akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

Journal article

- Andriani, D. M., & Sunarta, I. N. (2015). *Pengelolaan Desa Wisata Belimbing Menuju Pariwisata Berkelanjutan Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan*, Bali. 17-23.
- Okech, R., Haghiri, M., & George, B. P. (2012). *Rural Tourism as A Sustainable Development Alternative: An Analysis with Special Reference to*

Luanda, Kenya. OKECH, HAGHIRI, GEORGE / CULTUR / YEAR 6 - No. 03 - AUG Special issue., 36-52.

A book

- Yoeti, A. (2002). *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Internet

- https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Kebijakan-Perjalanan-di-Era-Pandemi-COVID_19, diakses pada 19 Oktober 2021
- <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>, diakses pada 19 Oktober 2021
- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/wisata-aman-kebijakan-sektor-pariwisata-di-tengah-pandemi-covid-19>, diakses pada 19 Oktober 2021